

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA
LAUNDRY DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**

AGUNG WICAKSONO¹

TAUFIQ EL RAHMAN, S.H., M.Hum.²

Kegiatan bisnis laundry semakin berkembang di kota-kota besar termasuk Yogyakarta. Pada kegiatan bisnis laundry menggunakan perjanjian standar atau klausul baku yang dicantumkan pada nota transaksi jasa laundry. Pada saat terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak laundry maka klausula baku yang tercantum pada nota transaksi laundry kurang melindungi hak konsumen.

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah Apakah klausul-klausul baku yang terdapat pada perjanjian jasa laundry telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jasa laundry telah memenuhi asas keadilan bagi konsumen.

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis buku-buku, laporan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta melakukan penelitian ke lapangan melalui metode wawancara kepada responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausul-klausul baku yang terdapat pada perjanjian jasa laundry belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena beberapa klausul baku yang terdapat dalam nota transaksi jasa laundry merupakan klausula eksensorasi. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jasa laundry telah memenuhi asas keadilan bagi konsumen.

Kata kunci: perjanjian standar, laundry, undang-undang perlindungan konsumen

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**RESOLUTION OF THE DEFAULT IN THE LAUNDRY SERVICES
AGREEMENT IN THE AREA OF YOGYAKARTA CITY**

AGUNG WICAKSONO³
TAUFIQ EL RAHMAN, S.H., M.Hum.⁴

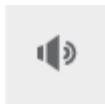
Laundry business activity growing in large cities including Yogyakarta. In the laundry business activities using the standard agreement or clause of the standard transaction note imprinted on the laundry services. In the event of default conducted party laundry then the standard clause listed in the memorandum of the transaction less laundry to protect consumer rights.

Formulation of the problem in the writing of this law is whether clauses in the Treaty of standard services laundry were in accordance with the provisions of the consumer protection act and default settlement agreement service laundry has fulfilled the principle of fairness for consumers.

The research used by the authors in the study uses empirical juridical approach. This research study library with collecting, reviewing and analyzing the books, reports, journals, and laws and regulations as well as conducting research into the field through interviews to the respondents.

The results of this research show that the clauses in the Treaty of standard services laundry has not been in accordance with the provisions of the consumer protection act because some of the standard clause contained in the memorandum of the transaction service laundry is clause excenoranti. Default settlement agreement service laundry has fulfilled the principle of fairness for consumers.

Keyword: standard agreement, laundry, consumer protection legislation



³ Student of Faculty of Law, Universtas Gadjah Mada

⁴ Lecturer of Faculty of Law, Universtas Gadjah Mada